

Building Resilience in Preventing Violent Extremism through  
Moderate Religious Education in Indonesia - **CONVEY Indonesia**

# Naskah Kebijakan

Issue 5 | Vol. 1 | 2020

**Naskah Kebijakan** ini dibuat sebagai bagian dari proyek CONVEY Indonesia yang diselenggarakan PPIM UIN Jakarta dan UNDP Indonesia.

CONVEY Indonesia dimaksudkan untuk membangun perdamaian di Indonesia dan mencegah ekstremisme dengan kekerasan dan radikalisme melalui serangkaian riset, survei, advokasi kebijakan, dan interaksi publik yang berbasis pada potensi pendidikan agama. Proyek CONVEY Indonesia menyentuh isu-isu toleransi, kebhinekaan, dan nir-kekerasan di kalangan generasi muda.

# Penguatan Moderasi Beragama di Indonesia

## TIM PENYUSUN:

Fuad Jabali

Aziz Awaludin

Wahyu Maulana Firdaus



FORUM KEBIJAKAN BERKALA  
PPIM UIN JAKARTA - CONVEY INDONESIA  
2020

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, berimbang, dan tidak ekstrem dalam praktik beragama. Norma umum yang dipegang adalah setiap individu pemeluk agama, apapun suku, etnis, budaya, agama, dan pilihan politiknya harus mau saling mendengarkan satu sama lain, serta saling belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan pemahaman keagamaan di antara mereka.

Penguatan moderasi beragama hadir untuk menjawab permasalahan sebagai berikut:

**Pertama**, berdasarkan data Kemenag pada 2017, 2018 dan 2019, terjadi fluktuasi dalam penilaian Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB). Tapi ketiga Indeks KUB tersebut masih dalam kategori tinggi dengan skor 72.20, 70.90, dan 73.93 secara berturut-turut. Faktor-faktor sosial seperti pendidikan, pendapatan, dan heterogenitas-homogenitas agama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks KUB

**Kedua**, Indeks Kesalehan Sosial (IKS) 2018 menunjukkan bahwa dimensi kesalehan sosial tertinggi adalah dimensi keterlibatan dalam demokrasi dengan nilai 90,47, kemudian diikuti dengan dimensi tidak menghina dengan nilai 88,26. Sedangkan dimensi kesalehan sosial terendah (di bawah skor nasional) adalah sikap peduli (*caring*) dengan nilai 61,09 dan sikap menghargai perbedaan dengan nilai 50,10.

**Ketiga**, Indeks Modal Sosial (IMS) dari BPS pada tahun 2017, hasil survei menunjukkan bahwa rata-rata Indeks Modal Sosial di Indonesia yaitu sebesar 47,86. Dari 34 provinsi yang diukur, lebih dari setengahnya memiliki nilai dibawah rata-rata.

**Keempat**, berdasarkan Indeks Kota Toleran (IKT) SETARA Institute tahun 2018, kota-kota besar seperti Jakarta, Padang, dan Makassar masuk ke dalam kota dengan tingkat toleransi yang rendah. Di antara kota-kota tersebut yaitu Tanjung Balai (2,817), Banda Aceh (2,830), Jakarta (2,880), Cilegon (3,420), Padang (3,450), Depok (3,490), Bogor (3,533), Makassar (3.637), Medan (3,710), dan Sabang (3,757).

**Kelima**, dalam dua tahun terakhir (2018 & 2019), Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta melakukan berbagai riset terkait intoleransi dan radikalisme di dunia pendidikan. Pada tahun 2018 riset mengenai mahasiswa menunjukkan bahwa sekitar 50 persen siswa dan mahasiswa memiliki sikap dan cara pandang yang intoleran dan radikal. Selain mahasiswa, riset PPIM tahun 2019 juga menunjukkan bahwa guru pun memiliki kecenderungan yang sama, yaitu memiliki tingkat radikalisme dan intoleransi yang tinggi, lebih dari 50 persen.

**Keenam**, berdasarkan riset Center for The Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Jakarta dan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta (2019), literasi keagamaan yang disusun oleh takmir masjid minim membahas isu persatuan dan kebangsaan. Tema-tema kebangsaan seperti NKRI, Pancasila dan kebhinnekaan, toleransi, menghargai perbedaan, dan anti kekerasan, hanya menjadi tema-tema yang lepas, sesuai kreativitas penceramah.

**Ketujuh**, hasil survei PUSAD Paramadina dan PPIM UIN Jakarta (2019) juga menunjukkan sebanyak 272 (54,6%) penyuluh agama Islam setuju dan sangat setuju jika pemerintah harus menerapkan hukum Islam secara absolut. Sebanyak 164 (32,9%) penyuluh juga sepakat bahwa dalam negara harus dijalankan sesuai dengan hukum agama dan di bawah otoritas pemimpin yang seagama.

Hasil riset tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Untuk menjawab persoalan tersebut strategi moderasi beragama dilakukan melalui dua hal utama, yaitu:

1. Moderasi Beragama dalam Pendidikan

Dengan strategi penguatan moderasi beragama dalam pendidikan, tujuan yang ingin dicapai adalah terwujudnya pendidikan yang inklusif dan toleran. Hasil yang diharapkan dari strategi ini yaitu menguatnya paham keagamaan yang moderat di berbagai lini dunia pendidikan Indonesia.

2. Moderasi Beragama dalam Sosial Kemasyarakatan

Dengan strategi penguatan moderasi beragama dalam sosial kemasyarakatan, tujuan yang ingin dicapai adalah terciptanya masyarakat Islam yang moderat. Hasil yang diharapkan dari strategi ini yaitu menguatnya paham keagamaan yang moderat di setiap lapisan masyarakat.

## KATA PENGANTAR

Penguatan moderasi beragama di Indonesia dewasa ini menjadi sangat penting dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah. Artinya, seorang insan yang moderat selalu bertindak adil, berimbang, dan tidak ekstrem dalam praktik beragama sehari-hari. Norma umum yang dipegang haruslah mengacu pada keyakinan bahwa setiap individu pemeluk agama, apapun suku, etnis, budaya, keyakinan, dan pilihan politiknya harus mau saling mendengarkan satu sama lain. Juga, harus ada upaya saling belajar melatih kemampuan dalam mengelola dan mengatasi perbedaan pemahaman keagamaan dan keyakinan di antara mereka.

Saat ini moderasi beragama sudah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Tujuannya adalah untuk mengembalikan esensi agama, yaitu menjaga martabat manusia; mengembalikan teks pada konteksnya; dan merawat keindonesiaan yang multikultural. Dengan ini diharapkan agar moderasi beragama dapat menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi kebudayaan dalam memajukan sumber daya manusia Indonesia. Dalam RPJMN 2020-2024, penguatan moderasi beragama menjadi Program Prioritas (PP) nasional. Ini merupakan satu dari empat PP yang menjadi bagian dari Prioritas Nasional (PN) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.

Untuk merealisasikan program ini ada lima Kegiatan Prioritas (KP) yang mencakup: 1) penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama jalan tengah; 2) penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama; 3) penguatan relasi agama dan budaya; 4) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; 5) pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan. PP3 Moderasi Beragama ingin menjawab isu strategis yang terkait “masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai agama yang moderat, inklusif, dan toleran untuk memperkuat kerukunan umat beragama.”

# DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	2
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	5
I. PENDAHULUAN	6
II. PERMASALAHAN	7
Indeks Kerukunan Umat Beragama	7
Indeks Kesalehan Sosial	7
Indeks Modal Sosial	8
Indeks Kota Toleran	8
Paparan radikalisme di dunia pendidikan	8
Melemahnya peran ulama, imam, khatib, takmir, dan penyuluh agama Islam	8
III. TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN METODOLOGI	10
IV. KEBIJAKAN ALTERNATIF	11
V. ANALISA KEBIJAKAN ALTERNATIF	13
VI. PENUTUP	17
REFERENSI	18

## I. PENDAHULUAN

Indonesia sedang mengalami peningkatan tren kekerasan berbasis agama dan pandangan ekstrem yang mengkhawatirkan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa paham radikalisme dan intoleransi telah masuk di berbagai lini, mulai dari pendidikan, sipil, hingga rumah ibadah. Sejak 2017, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengembangkan program Convey Indonesia bekerjasama dengan UNDP Indonesia. Serangkaian survei nasional (2017 & 2018) menunjukkan bahwa lebih dari 50% siswa, mahasiswa, serta guru dan dosen (bahkan mulai dari tingkatan TK/RA) memiliki pandangan intoleran dan radikal. Salah satu penyebabnya adalah referensi dalam kehidupan beragama, seperti ustaz dan buku, baik melalui media elektronik maupun cetak. Pada sipil, seperti peran penyuluh agama dan organisasi pemuda, juga andil dalam peningkatan isu-isu intoleransi dan radikalisme. Selain itu, paham radikalisme dan intoleransi juga merambah pada rumah ibadah, bahkan pada BUMN (Survei P3M, 2018).

Temuan penelitian ini sejalan dengan indeks pengukuran kualitas hidup beragama di Indonesia yang mengalami penurunan yang cukup substansial. Pada 2018, SETARA Institut melalui Indeks Kota Toleran (IKT) menemukan bahwa kota-kota besar di Indonesia terindikasi intoleran. DKI Jakarta menempati urutan ketiga (dari 94 kota yang disurvei) sebagai kota paling intoleran (posisi 92) dan disusul oleh Bogor (posisi 88), Makassar (87) dan Medan (posisi 86). Jika dibandingkan dengan data IKT tahun 2015, DKI Jakarta turun dari peringkat 65 menjadi peringkat ke-92 (10 kota dengan skor toleransi terendah).

Ini menjadi alarm yang keras bagi Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia. Di tanah air, arus seruan moderasi beragama juga semakin mengalir, didasarkan atas keragaman etnis, suku, budaya, bahasa, dan agama dan kepercayaan, dan pengalaman hidup bersama secara harmonis selama berabad-abad. Kebijaksanaan lokal (*local wisdom*) yang telah terbangun selama ini, terusik dengan aksi-aksi intoleransi, radikalisme, ekstremisme berkekerasan bahkan terorisme.

Dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, “penguatan moderasi beragama” telah menjadi salah satu program prioritas nasional. Tujuannya adalah untuk mengembalikan esensi agama, yaitu menjaga martabat manusia; mengembalikan teks pada konteksnya; dan merawat keindonesiaan yang multikultural. Pembangunan nasional akan sulit tercapai tanpa keadaan sosial-keagamaan yang kondusif. Nilai-nilai agama dan kearifan lokal dapat didayagunakan sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan. Menjadi sangat krusial menambahkan perspektif moderasi beragama dalam misi pembangunan manusia Indonesia. Pemerintah Pusat dinilai perlu merancang formulasi kebijakan khusus untuk menginisiasi nilai-nilai moderasi beragama di berbagai aspek. Oleh karena itu, PPIM UIN Jakarta ingin mengajukan audiensi dengan Staf Khusus Presiden RI untuk mendorong terciptanya kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy making*).

## II. PERMASALAHAN

Dalam sekitar 3 tahun terakhir, kondisi masyarakat di Indonesia agaknya perlu lebih diperhatikan, khususnya dalam hal keagamaan dan perdamaian. Berikut adalah potret besar dari berbagai penelitian yang berskala nasional.

### Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) adalah survei nasional yang dilakukan Balitbang Diklat Kementerian Agama RI untuk mengukur tingkat kerukunan umat beragama di Indonesia. Sebagai sebuah instrumen, Indeks KUB menggambarkan suatu kondisi hubungan umat beragama yang toleran, setara dalam menjalankan agama, serta bekerjasama dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuannya untuk memberikan informasi dan masukan bagi instansi/lembaga terkait tentang peta indeks kerukunan umat beragama di Indonesia. Terjadi fluktuasi dalam penilaian Indeks KUB, tapi ketiga Indeks KUB tersebut masih dalam kategori tinggi dengan skor 72.20, 70.90, dan 73.93 secara berturut-turut.

Pada 2019, Provinsi Papua Barat menempati daftar teratas sebagai daerah paling rukun di Indonesia dengan skor 83.4, sedangkan Aceh berada di posisi paling bawah dengan skor 60.2. Di 2018, Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi yang mendapatkan skor kerukunan tertinggi dengan 78.9 poin. Di urutan terakhir ada Sumatera Barat dengan poin 60.2. Pada tahun 2017, Nusa Tenggara Timur menjadi teratas dengan nilai 82.1 dan Aceh menjadi provinsi yang menempati posisi paling akhir dengan skor 60. Dari ketiga dimensi Indeks KUB, indikator “kerjasama” selalu mendapatkan skor paling tinggi sedangkan “toleransi” selalu menjadi yang paling rendah. Faktor-faktor sosial seperti pendidikan, pendapatan, dan heterogenitas-homogenitas agama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks KUB.

### Indeks Kesalehan Sosial

Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat melaksanakan Survei Indeks Kesalehan Sosial (IKS) pada tahun 2018. Survei IKS 2018 melibatkan 30 responden pada setiap Kabupaten/Kota, yang berasal dari unsur rohaniwan, pengurus rumah ibadah, dan umat. Dalam pengerjaannya, survei IKS 2018 melibatkan 30 responden pada setiap Kabupaten/Kota, yang berasal dari unsur rohaniwan, pengurus rumah ibadah, dan umat. Menggunakan kuesioner, survei ini ingin mengetahui sejauh mana relevansi antara pemahaman keagamaan masyarakat Indonesia dengan pengalamannya pada tingkat sosial. IKS 2018 menunjukkan bahwa dimensi kesalehan sosial tertinggi adalah dimensi keterlibatan dalam demokrasi dengan nilai 90,47, kemudian diikuti dengan dimensi tidak

menghina dengan nilai 88,26. Sedangkan dimensi kesalehan sosial terendah (di bawah skor nasional) adalah sikap peduli (*caring*) dengan nilai 61,09 dan sikap menghargai perbedaan dengan nilai 50,10.

### Indeks Modal Sosial

Indeks Modal Sosial adalah nilai yang disusun dari Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pada tahun 2017, hasil survei menunjukkan bahwa rata-rata Indeks Modal Sosial di Indonesia yaitu sebesar 47,86. Dari 34 provinsi yang diukur, lebih dari setengahnya memiliki nilai dibawah rata-rata. Adapun salah satu dimensi yang diukur pada modal sosial yaitu dimensi sikap percaya dan toleransi. Rata-rata nilai sikap percaya dan toleransi di Indonesia adalah 55,03. Beberapa provinsi seperti Kepulauan Riau (48,77), Aceh (49,95), dan Sumatera Barat (50,43) memiliki nilai di bawah rata-rata. Contoh indikator yang membuat nilai toleransi rendah pada provinsi tersebut yaitu lebih dari 50 persen menyatakan tidak setuju bila ada sekelompok orang dari agama lain melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.

### Indeks Kota Toleran

Indeks Kota Toleran adalah indeks yang dikeluarkan SETARA Institute yang disusun dengan mengutamakan praktik-praktik toleransi di kota-kota di Indonesia. Indikator yang digunakan untuk menilai tingkat toleransi yaitu regulasi pemerintah kota, tindakan pemerintah (terkait peristiwa intoleransi), regulasi sosial (peristiwa intoleransi), dan demografi agama. Berdasarkan survei SETARA Institute tahun 2018, beberapa kota masuk ke dalam kategori kota dengan skor toleransi terendah. Di antara kota-kota tersebut yaitu Tanjung Balai (2,817), Banda Aceh (2,830), Jakarta (2,880), Cilegon (3,420), Padang (3,450), Depok (3,490), Bogor (3,533), Makassar (3,637), Medan (3,710), dan Sabang (3,757). Dilihat dari data tersebut, terlihat kota-kota besar seperti Jakarta, Padang, dan Makassar masuk ke dalam kota dengan tingkat toleransi yang rendah.

### Paparan radikalisme di dunia pendidikan

Dalam dua tahun terakhir, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta melakukan berbagai riset terkait intoleransi dan radikalisme di dunia pendidikan. Pada tahun 2017 riset mengenai mahasiswa menunjukkan bahwa sekitar 50 persen siswa dan mahasiswa memiliki sikap dan cara pandang yang intoleran dan radikal. Lebih spesifik lagi, riset juga dilakukan pada mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam (PAI). Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat intoleransinya juga tinggi, sekitar 60 persen. Selain mahasiswa, riset PPIM tahun 2018 juga menunjukkan bahwa guru pun memiliki kecenderungan yang sama, yaitu memiliki tingkat radikalisme dan intoleransi yang tinggi, lebih dari 50 persen. Masih pada riset PPIM, tahun 2019 juga dilakukan riset mengenai buku ajar mata kuliah PAI di perguruan tinggi umum. Hasilnya tidak jauh berbeda, yaitu bahwa beberapa buku teridentifikasi memuat konten paham keagamaan yang menyempit.



## **Melemahnya peran ulama, imam, khatib, takmir, dan penyuluh agama Islam Terkait pandangan keagamaan takmir, khatib, dan imam masjid.**

Berdasarkan riset Center for The Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Jakarta dan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta (2019), literasi keagamaan yang disusun oleh takmir masjid umumnya bertujuan untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan *ukhuwah islamiyah* di antara para jamaah dan kaum Muslim pada umumnya. Tema-tema kebangsaan seperti NKRI, Pancasila dan kebhinnekaan, toleransi, menghargai perbedaan, dan anti kekerasan, hanya menjadi tema-tema yang lepas, sesuai kreativitas penceramah. Minimnya materi kebangsaan dan hubungan antaragama oleh penceramah tidak lantas menunjukkan bahwa masjid bersangkutan memiliki kecenderungan radikal. Semua takmir masjid yang diwawancarai menolak ide-ide radikalisme dan mendukung wacana kebangsaan, kebhinnekaan, dan toleransi antar agama. Dari 100 masjid di tujuh kota yang diteliti CSRC UIN Jakarta tersebut, pada umumnya untuk mengisi ceramah akan kedatangan penceramah dari luar. Cara merekrutnya pun cenderung sama, yaitu membawanya ke dalam rapat pengurus dan membicarakannya dengan dewan penasihat masjid untuk meminta persetujuan. Lebih dari itu, bahkan sampai dilihat rekam jejak, kecenderungan radikalisme, hingga membatasi topik ceramah dan melarang politisasi masjid. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan penceramah yang diinginkan dan menghindari penceramah yang memiliki kecenderungan radikal.

## **Terkait pandangan keagamaan penyuluh agama Islam.**

Hasil survei PUSAD Paramadina dan PPIM UIN Jakarta (2019) menunjukkan sebanyak 272 (54,6%) penyuluh agama Islam setuju dan sangat setuju jika pemerintah harus menerapkan hukum Islam secara absolut. Sebanyak 164 (32,9%) penyuluh juga sepakat bahwa dalam negara harus dijalankan sesuai dengan hukum agama dan di bawah otoritas pemimpin yang seagama. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa benih-benih eksklusivisme mulai masuk ke dalam penyuluh agama Islam. Terkait kapasitas penyuluh agama Islam non-PNS, spesialisasi pada penyuluh agama Islam tidak diikuti oleh peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang dapat menunjang pekerjaan mereka. Penyuluh mengaku sering gagap dalam menghadapi isu-isu baru seperti *hoax* dan ujaran kebencian. Mereka harus mencari informasi sendiri dari berbagai sumber seperti buku populer dan media online.

### III. TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN METODOLOGI

Penyusunan naskah kebijakan (*policy paper*) tentang “Penguatan Moderasi Beragama di Indonesia” bertujuan untuk menjembatani dokumen RPJMN 2020-2024 yang telah ada ke dalam sebuah strategi dan kebijakan operasional yang terperinci. Mengingat RPJMN 2020-2024 memuat Program Prioritas “Penguatan Moderasi Beragama,” naskah kebijakan ini bermanfaat sebagai faktor pengungkit (*leverage factor*) guna terwujudnya penguatan moderasi beragama di pendidikan Indonesia.

Isi pembahasan naskah kebijakan ini mencakup kebijakan dan isu di lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dokumen naskah kebijakan ini juga memuat implementasi program/kegiatan lain yang tidak termuat di dalam dokumen RPJMN 2020-2024. Selanjutnya, Kemendikbud diharapkan dapat menurunkan alternatif kebijakan ini dalam rencana strategis (Renstra) untuk periode 2020-2024, baik dalam lingkup kementerian atau direktorat-direktorat jenderal yang dinaunginya.

Terkait metodologi, dalam merumuskan strategi dan kebijakan operasional tersebut, metodologi yang digunakan adalah analisis SWOT (*Strength - Weakness - Opportunity - Threat* atau Kekuatan - Kelemahan - Peluang - Tantangan) dan TOWS (*Threat - Opportunity - Weakness - Strength* atau Kelemahan - Peluang - Kelemahan - Kekuatan). Juga, dilakukan analisis pakar (*expert analysis*) dengan menggunakan Skala Likert 1 sampai 5. Disamping itu, naskah kebijakan ini didukung dengan studi literatur, audiensi, dan diskusi terfokus untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kebijakan.

Kegiatan penyusunan naskah kebijakan penguatan moderasi beragama secara spesifik, juga merumuskan langkah strategis, konkret, berkelanjutan, yang menstimulasi peningkatan pandangan, sikap, opini, dan intensi aksi toleransi dan moderat di kalangan masyarakat beragama. Sehingga terwujud masyarakat yang cinta damai, saling menghargai dalam perbedaan.

## IV. KEBIJAKAN ALTERNATIF

Setelah meninjau ulang kebijakan-kebijakan saat ini dan permasalahan riil di lapangan. Dalam bagian ini akan dirangkum daftar kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Keempat faktor ini kemudian dibagi menjadi dua: internal faktor dan eksternal faktor. Sebelum menyampaikan alternatif kebijakan sebagai solusi dari permasalahan yang ada, curah pikiran (*brainstorming*) ini sangat penting untuk disajikan dalam matriks SWOT.

**Tabel 1. Analisis SWOT**

	<b>Kekuatan (Strengths)</b>	<b>Kelemahan (Weaknesses)</b>
<b>Faktor internal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya pelatihan dan sertifikasi berkala untuk meningkatkan kualitas guru dan dosen PAI.</li> <li>2. Banyak sekolah/madrasah/pesantren yang dapat memasok calon mahasiswa PAI berkualitas.</li> <li>3. Beberapa buku ajar PAI sudah mengikuti aturan yang ada.</li> <li>4. Sumber daya penyuluh agama yang terbilang banyak.</li> <li>5. Sebagian besar penyuluh agama telah menempuh pendidikan S1.</li> <li>6. Komitmen Kemenag untuk memasukkan unsur moderasi dalam kontrak kerja penyuluh agama.</li> <li>7. Berbagai modul pengayaan bagi penyuluh agama sudah tersedia secara daring.</li> <li>8. Terdapat lembaga yang khusus menangani masjid (Dewan Masjid Indonesia).</li> <li>9. Kesadaran pengelola masjid akan bahaya radikalisme.</li> <li>10. Terdapat data awal mengenai persebaran buletin Jumat, baik yang radikal maupun nonradikal.</li> <li>11. Pemerintah memiliki anggaran yang cukup besar berkaitan dengan penolakan pada paham radikalisme.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas jurusan PAI di banyak PTKI masih rendah, terutama yang swasta.</li> <li>2. Prodi PAI belum menjadi pilihan utama calon mahasiswa unggulan.</li> <li>3. Koordinasi antara Kemendikbud dan Kemenag masih sangat kurang, terutama dalam manajemen pendidikan Agama (dosen, buku, kurikulum, dll).</li> <li>4. Adanya beberapa oknum dosen dan guru agama yang memiliki agendanya sendiri yang bertentangan dengan ideologi berbangsa dan bernegara.</li> <li>5. Kurangnya dukungan regulasi terkait penyuluh agama.</li> <li>6. Rendahnya kemampuan penyuluh agama dalam menghadapi polarisasi masyarakat.</li> <li>7. Unit kerja penyuluh agama Islam Non-PNS berdasarkan wilayah, bukan spesialisasi. Sehingga penyuluh agama Islam Non-PNS harus menguasai lebih dari satu topik.</li> <li>8. Kurangnya penegasan atau sanksi atas pelanggaran yang dilakukan pengelola masjid.</li> </ol>
	<b>Peluang (Opportunities)</b>	<b>Ancaman (Threats)</b>
<b>Faktor eksternal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Pusat fokus pada peningkatan SDM untuk periode 2019-2024.</li> <li>2. Kajian, baik berupa survei ataupun penelitian dari berbagai lembaga tentang intoleransi dan radikalisme, sudah banyak ditemukan.</li> <li>3. Banyak lembaga kemasyarakatan atau keagamaan yang peduli akan isu intoleransi dan radikalisme.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ego sektoral menyebabkan lemahnya koordinasi antar direktorat dan unit kerja di lapangan.</li> <li>1. politik identitas yang menggunakan isu SARA memengaruhi eksklusivitas pola pikir siswa, guru, mahasiswa, dan dosen dalam beragama.</li> <li>2. Institusi swasta sulit dikontrol.</li> <li>3. Kurangnya interaksi dan perjumpaan dengan orang yang berbeda agama menyebabkan eksklusivitas pemikiran.</li> </ol>

Berdasarkan analisis SWOT di atas, maka dapat dipertimbangkan beberapa hal strategis untuk menjadi bahan rumusan pembuatan kebijakan alternatif untuk menguatkan moderasi beragama di Indonesia. Analisa ini kemudian disajikan dalam matrik TOWS berikut:

**Tabel 2.** Analisis TOWS

	Kelemahan ( <i>Weaknesses</i> )	Kekuatan ( <i>Strengths</i> )
Peluang ( <i>Opportunities</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan koordinasi antara Kemendikbud dan Kemenag</li> <li>2. Mengadakan pendidikan dan pelatihan berperspektif moderasi beragama untuk guru dan dosen, khususnya guru dan dosen PAI.</li> <li>3. Memberikan kejelasan terkait unit kerja penyuluh agama.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan kurikulum PAI berperspektif moderasi beragama.</li> <li>2. Mengoptimalkan penyuluh agama sebagai ujung tombak penyebaran ajaran agama yang moderat.</li> <li>3. Mendesak pemerintah dan elemen masyarakat untuk turut mengawasi pengelolaan masjid.</li> </ol>
Ancaman ( <i>Threats</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya radikalisme dan intoleransi.</li> <li>2. Meningkatkan literasi keagamaan di lingkungan masjid.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat kesepakatan dengan berbagai perguruan tinggi terkait bagaimana pembelajaran PAI di perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi umum.</li> <li>2. Bekerja sama dengan ormas untuk mendampingi kegiatan keagamaan di masyarakat.</li> <li>3. Melakukan riset nasional mengenai dampak media, khususnya Buletin Jumat terhadap radikalisme dan intoleransi.</li> </ol>

Berdasarkan identifikasi isu di atas melalui analisis SWOT serta TOWS, maka untuk mempercepat tercapainya target penguatan moderasi beragama di tingkat perguruan tinggi perlu disusun strategi dan kebijakan operasional, meliputi:

### 1. Moderasi Beragama dalam Pendidikan

Dengan strategi penguatan moderasi beragama dalam pendidikan, tujuan yang ingin dicapai adalah terwujudnya pendidikan yang inklusif dan toleran. Hasil yang diharapkan dari strategi ini yaitu menguatnya paham keagamaan yang moderat di berbagai lini dunia pendidikan Indonesia.

### 2. Moderasi Beragama dalam Sosial Kemasyarakatan

Dengan strategi penguatan moderasi beragama dalam sosial kemasyarakatan, tujuan yang ingin dicapai adalah terciptanya masyarakat Islam yang moderat. Hasil yang diharapkan dari strategi ini yaitu menguatnya paham keagamaan yang moderat di setiap lapisan masyarakat.

## V. ANALISA KEBIJAKAN ALTERNATIF

Sebagai *leading sector*, Kementerian Agama RI memiliki peran yang sangat krusial dalam menyukseskan Program Prioritas 3 Moderasi Beragama yang sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Untuk itu, dalam naskah kebijakan ini terlebih dahulu strategi implementasi moderasi beragama diturunkan dalam intervensi detil bagi tiap direktorat yang berkaitan dengan isu pendidikan dan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya, diharapkan kementerian dan lembaga yang dapat menjadikan Kemenag sebagai model dan rujukan utama dalam merealisasikan program-program moderasi beragama dalam berbagai sektor lainnya.

### 1. Pendidikan

Strategi penguatan moderasi beragama pada ranah pendidikan di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Pendis) Kementerian Agama RI meliputi semua direktorat yang ada. Berikut adalah intervensi yang dapat dilakukan:

#### **Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)**

Menguatnya kapasitas perguruan tinggi keagamaan Islam sebagai pusat peradaban bagi berkembangnya diskursus keilmuan dan keislaman yang moderat.

*Indikator:*

#### 1. Kurikulum

- Mendorong pengembangan Kurikulum PTKI yang berperspektif moderasi beragama.
- Menggunakan bahan ajar yang berkualitas dan berlandaskan moderasi.

#### 2. Mahasiswa

- Mendorong kegiatan kemahasiswaan yang menghargai perbedaan dengan kegiatan perjumpaan lintas agama dan kelompok.
- Mempertimbangkan latar belakang calon mahasiswa dalam proses seleksi PTKI, terutama yang berasal dari madrasah atau pesantren.
- Melakukan *need assessment* bagi calon guru sebagai data dalam rekrutmen calon mahasiswa tarbiyah.

#### 3. Dosen

- Dosen tidak didukung sistem yang baik à pandangan sempit, kurang critical thinking, tidak terekspos dengan keragaman/network à rekrutmen dosen berkualitas, attachment ke lembaga penelitian.
- Dosen pintar disebar di IAIN lain/ke tingkat yang lebih rendah; kolaborasi riset yang terstruktur.

### **Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah**

Menguatnya aspek kelembagaan madrasah untuk mengembangkan kurikulum dan sarana yang kondusif bagi berkembangnya siswa-siswi yang moderat.

*Indikator:*

1. Kelembagaan
  - Membangun atmosfer kelembagaan yang efektif dan efisien dengan menyederhanakan proses administrasi.
2. Kurikulum
  - KI-KD kurikulum dikuatkan dengan substansi kerukunan lintas agama dan kepercayaan dengan cara memperbanyak kegiatan perjumpaan lintas iman di sekolah-sekolah.
3. Sarana
  - Mengkondisikan sarana dan prasarana madrasah yang kondusif bagi pertumbuhan lingkungan akademik siswa yang
4. Siswa
  - Mengadakan kegiatan pembelajaran dan organisasi kesiswaan yang menghargai perbedaan.

### **Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah**

Meningkatnya ketersediaan guru dan tenaga kependidikan yang mampu memfasilitasi tumbuhnya moderasi beragama di madrasah.

*Indikator:*

1. Guru
  - Sistem rekrutmen guru dibenahi dengan cara memasukkan pengukuran (kuesioner, interview, observasi, dll dalam SKD dan SKB sistem seleksi CPNS) terkait moderasi keberagaman berupa keputusan bersama Kemenag, Kemendikbud, Kemenpan-RB, dan Pemda.
2. Tenaga kependidikan
  - Meningkatkan kapasitas tenaga kependidikan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, terutama dalam mengumpulkan dan memanfaatkan data bagi peningkatan kualitas madrasah.

### **Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren)**

Menjadikan pondok pesantren dan diniyah sebagai lembaga yang melahirkan santri dan siswa yang moderat.

*Indikator:*

1. Pondok pesantren
  - Mendorong Pontren untuk mengintegrasikan moderasi beragama dalam kurikulum, rekrutmen dan pembinaan ustaz/guru dan santri.
  - Melestarikan pengkajian kitab kuning nusantara di lingkungan pondok pesantren.
2. Pendidikan diniyah
  - Menyusun kegiatan dan aktivitas belajar yang terbuka, inklusif dan moderat.
  - Meningkatkan pembinaan guru/pendidik di tingkat diniyah.

### **Direktorat Pendidikan Agama Islam (PAI)**

Menguatnya sistem pendidikan agama Islam di sekolah dan kampus umum yang bisa membangun dialog keilmuan yang produktif untuk melahirkan siswa dan mahasiswa yang moderat.

*Indikator:*

#### 1. Kewenangan

- Memastikan kewenangan yang jelas antara Kemenag dan Kemendikbud dalam membina guru agama.
- Memastikan kewenangan yang jelas antara Kemenag dan PTU dalam pembinaan dosen PAI.

#### 2. Koordinasi

- Menguatkan kerangka koordinasi antara Kemenag, Kemendikbud, dan PTU terkait.
- Mengeluarkan peraturan bersama antara Kemenag dan Kemendikbud untuk membenahi tata kelola pendidikan agama Islam di institusi pendidikan umum.

## **2. Sosial Kemasyarakatan**

Penguatan moderasi beragama pada ranah sosial kemasyarakatan dapat dilakukan dengan berbagai strategi yang melibatkan Kementerian Agama RI, khususnya di Direktorat Urusan Agama Islam dan Penerangan Agama Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Berikut adalah intervensi yang dapat dilakukan:

### **Direktorat Urusan Agama Islam (Urais)**

Menguatnya paham keagamaan yang moderat di setiap lapisan masyarakat.

*Indikator:*

#### 1. Kemasjidan

- Membuat petunjuk (*guidance*) keberagaman yang moderat untuk seluruh perangkat masjid (takmir, imam, khatib).
- Berkoordinasi dengan "Ormas moderat" untuk ikut serta dalam pemakmuran masjid.
- Berkoordinasi dengan Subdit/Dit/pihak lain untuk memperkaya literasi keagamaan yang moderat di masjid.

#### 2. Konflik

- Melakukan pemetaan wilayah konflik.
- Berkoordinasi dengan K/L lain untuk bekerjasama dalam penanganan konflik (spt. penyuluh agama, ormas, dsb).
- Kepustakaan Islam
- Memperkaya literasi keagamaan Islam yang moderat.
- Membuat standar buku agama yang moderat.

### **Direktorat Penerangan Agama Islam (Penais)**

Terciptanya komunikasi yang sarat akan unsur perdamaian dan moderasi beragama.

*Indikator:*

#### 1. Penyuluh Agama

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas diklat moderasi beragama pada penyuluh agama Islam.

- Membekali penyuluh agama dengan berbagai keterampilan pendukung pekerjaan.
  - Reformulasi kurikulum Diklat penyuluh agama Islam sesuai kebutuhan di lapangan.
  - Melakukan pendataan penyuluh agama di wilayah.
2. Majelis Taklim
- Melakukan pendampingan pada majelis taklim.
  - Membuat buku pedoman majelis taklim yang berlandaskan moderasi beragama.
3. Koordinasi
- Berkoordinasi dengan kanwil atau KUA untuk monitoring dan evaluasi penyuluh agama.
  - Menjalin dan memperkuat kemitraan dengan “Ormas moderat” dan lembaga keagamaan lainnya, baik dalam maupun luar negeri.



## VI. PENUTUP

Moderasi beragama telah menjadi salah satu *flagship* Kementerian Agama RI dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Penguatan moderasi beragama menjadi Program Prioritas 3 (PP3), bagian dari Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Moderasi beragama diartikan sebagai cara pandang, sikap dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah. PP3 Moderasi Beragama ingin menjawab isu strategis yang terkait “masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai agama yang moderat, inklusif, dan toleran untuk memperkuat kerukunan umat beragama.”

Program Prioritas dalam RPJMN memiliki peran yang vital dalam pembangunan nasional. RPJMN merupakan rujukan utama bagi setiap kementerian dan lembaga dalam perancangan Rencana Strategis (Renstra) untuk, kemudian, menciptakan pembangunan Indonesia yang berkesinambungan. Persoalan kebangsaan seperti intoleransi, ekstremisme, dan radikalisme harus menjadi perhatian utama Pemerintah untuk menjaga ekologi kehidupan beragama dan bernegara yang harmonis. Lingkungan pendidikan harus selalu dijaga demi mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan dasar dan kesadaran ini semua, penguatan moderasi beragama dapat mendukung dan mempercepat capaian target-target pembangunan nasional yang dicanangkan dalam RPJMN 2020-2024.

## REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2017). Indeks modal sosial 2017. Diperoleh dari: <https://www.bps.go.id/publication/2018/12/17/14cb23d20ffdd1a47b934b6d/statistik-modal-sosial-2017.html>
- Convey Indonesia. (2018). Api dalam sekam: Sikap dan keberagaman Gen-Z. Diperoleh dari: <https://conveyindonesia.com/download/1576/>
- Convey Indonesia. (2018). Sikap dan perilaku keberagaman guru dan dosen pendidikan agama Islam. Diperoleh dari: <https://conveyindonesia.com/download/1595/>
- Convey Indonesia. (2019). Pelita yang meredup: Keberagaman guru sekolah/madrasah di Indonesia. Diperoleh dari: <https://conveyindonesia.com/download/1562/>
- Convey Indonesia. (2019). Literasi keagamaan: Takmir, imam, khatib. Diperoleh dari: <https://conveyindonesia.com/download/1570/>
- Convey Indonesia. (2019). Persepsi ulama tentang Negara-Bangsa: Otoritas, negosiasi, dan reservasi. Diperoleh dari: <https://conveyindonesia.com/download/1566/>
- Convey Indonesia. (2019). Merawat kesalehan umat: Buletin Jumat dalam dinamika paham keagamaan. Diperoleh dari: <https://conveyindonesia.com/download/1574/>
- Convey Indonesia. (2019). Riset buku teks pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum di Indonesia. Diperoleh dari: <https://conveyindonesia.com/download/1841/>
- Kementerian Agama. (2018). Indeks kesalehan sosial tahun 2018.
- Kementerian Agama. (2019). Indeks kerukunan umat beragama tahun 2019.
- RPJMN: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024: Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan. (2019). Kementerian PPN/Bappenas RI. Diperoleh dari: [https://www.bappenas.go.id/files/rpjmN/Narasi%20RPJMN%20IV%202020-2024\\_Revisi%2028%20Juni%202019.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/rpjmN/Narasi%20RPJMN%20IV%202020-2024_Revisi%2028%20Juni%202019.pdf)
- Setara Institute. (2018). Indeks kota toleran tahun 2018. Diperoleh dari: <http://setara-institute.org/en/indeks-kota-toleran-tahun-2018/>



**Building Resilience in Preventing Violent Extremism  
through Moderate Religious Education in Indonesia**

Gedung PPIM UIN Jakarta,  
Jalan Kertamukti No. 5, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten 15419 Indonesia  
Tel: +62 21 7499272 | Fax: +62 21 7408633 | E-mail: [pmu.convey@gmail.com](mailto:pmu.convey@gmail.com) | Website: <https://conveyindonesia.com>

Collaborative Program:



*Empowered lives.  
Resilient nations.*